

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
MANAJEMEN LABA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SETYARSO HERLAMBAANG
NIM 12030113183010

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Setyarso Herlambang
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183010
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan
Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba
Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, SE., MBA., Ak.

Semarang, Juli 2015

Dosen Pembimbing,



(Dr. Darsono, SE., MBA., Ak.)
NIP. 196208131990011001

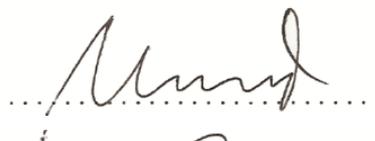
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Setyarso Herlambang
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183010
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan
Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 07 Juli 2015

Tim penguji

1. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.
2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.
3. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Setyarso Herlambang, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juli 2015
Yang membuat pernyataan,

(Setyarso Herlambang)
NIM. 12030113183010

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel GCG diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan ukuran komite audit, sedangkan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan. Variabel dependen, manajemen laba, diukur menggunakan *discretionary accrual*.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2013. Dalam pengambilan sampel, digunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh data penelitian sebanyak 168 perusahaan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: manajemen laba, *good corporate governance*, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of Good Corporate Governance (GCG) and firm size on earning management. GCG variable is proxied by board size, board composition and audit committee size. Firm size is measured by total assets. The dependent variable, earnings management, is measured by the discretionary accrual.

Population of this research are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012 and 2013. Purposive sampling method is using to take the samples so it takes 168 firm to use as data research. Method for testing the hypothesis in this research was conducted using multiple linear regression.

The results show that board composition and firm size have negative significant effect to earning management. This research also show that board size and audit committee size have no effect related to earning management.

Keywords: Earning management, good corporate governance, board size, board composition, audit committee size, firm size.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikaruniakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena rahmat dan kuasa-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. M. Syafrudin, MSi, Akt selaku ketua Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. Darsono, SE., MBA., Akt. selaku dosen wali, dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip atas ilmu yang bermanfaat, pengetahuan baru dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan.

5. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi yang luar biasa.
6. Putri Rachmasari, Ahmad Rifan dan Upik Maharani yang selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan hiburan.
7. Teman-teman kelas kerjasama BPK 2013 (Ikhlas, Dhana, Asyrofi, Imron, Nawa, Widhi dan Sahlan) atas kebersamaan selama 2 tahun terakhir yang menyenangkan.
8. Teman-teman EBC yang seru didalam maupun diluar lapangan badminton.
9. Teman-teman KKN atas kebersamaan dan keceriaannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juli 2015

(Setyarso Herlambang)

NIM. 12030113183010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKS	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	15
2.1.1. Landasan Teori.....	15
2.1.2. Penelitian Terdahulu	28
2.2. Kerangka Pemikiran	31
2.3. Perumusan Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.1.1. Variabel Dependen.....	37
3.1.2. Variabel Independen	39
3.2. Populasi dan Sampel	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	40
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5. Metode Analisis	41
3.5.1. Analisis Deskriptif.....	41
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5.3. Uji Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.2 Analisis Data.....	47
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	47

4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	50
4.2.3.1	Uji Normalitas.....	50
4.2.3.2	Uji Multikolinieritas.....	51
4.2.3.3	Uji Autokorelasi	52
4.2.3.4	Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.2.3	Analisis Linier Berganda	54
4.2.4	Uji Hipotesis	55
4.2.4.1	Uji Koefisien Determinasi.....	55
4.2.4.2	Uji Signifikansi Simultan (uji F).....	55
4.2.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (uji statistik t).....	56
4.2.5	Hasil Pengujian Hipotesis.....	57
4.3	Interpretasi Hasil.....	58
4.3.1.	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba	58
4.3.2.	Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba	59
4.3.3.	Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	60
4.3.4.	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba ...	60
BAB V	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Keterbatasan.....	63
5.3	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian	47
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif variabel penelitian	48
Tabel 4.3 Uji Non-parametrik <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	50
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi Model Regresi	52
Tabel 4.6 Uji <i>Glejser</i>	53
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F)	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Parsial t	56
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan	67
Lampiran B Hasil Uji Statistik	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Kansil, 2001). Tujuan utama perusahaan menurut *theory of the firm* yaitu untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (Salvatore, 2005). Menurut Sartono (2008), nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Gapenski, 1996).

Meningkatkan nilai perusahaan bukanlah hal yang mudah. Di era industrialisasi yang semakin kompetitif ini, setiap perusahaan dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif agar mampu bertahan dan memperoleh keuntungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemegang saham adalah dengan mempekerjakan tenaga ahli atau profesional untuk diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris untuk mengelola perusahaan dengan harapan perusahaan mereka akan mampu bersaing di pasar.

Berdasarkan teori agensi, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajer bertindak sebagai agen. Dalam teori agensi dinyatakan bahwa manajemen diminta membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawabannya kepada prinsipal atas aset perusahaan yang dipercayakan oleh prinsipal kepada agen. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tiap periode adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Manajemen akan berusaha untuk memperlihatkan bahwa perusahaan yang mereka kelola berada dalam kondisi yang sehat melalui laporan keuangan, karena selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham, laporan keuangan juga berfungsi untuk menarik minat investor agar berinvestasi pada perusahaan mereka.

Komponen laba pada laporan keuangan sering kali digunakan sebagai tolak ukur yang digunakan prinsipal dalam mengukur kinerja perusahaan. Menurut Stice dan Skousen (2009), laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. Laba merupakan indikator kinerja manajemen dalam mengolah harta kekayaan perusahaan. Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan laba yang dihasilkan dengan metode akrual (IAI, 2009). Menurut Dechow (1994), laba akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi karena akrual mempertimbangkan masalah waktu, tidak seperti yang terdapat dalam arus kas dari aktivitas operasional.

Manajer selaku agen yang menjalankan perusahaan memiliki informasi mengenai perusahaan lebih banyak dibandingkan prinsipal. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi itu disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi ini erat kaitannya dengan konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu ketika semua pihak memiliki dorongan untuk mendahulukan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga timbul adanya konflik antara prinsipal dengan agen. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang disesuaikan untuk kepentingan agen kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba (Widyaningdyah, 2001).

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Fischer dan Rosenzweig, 1995). Sedangkan Asih dan Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan *general accepted accounting principles*, untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memperbolehkan manajemen untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2009) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*). Tindakan oportunistik ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Praktik manajemen laba dapat merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebab manajemen laba membuat tampilan informasi pada laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan pemegang saham ataupun investor membuat keputusan yang salah. Dampak yang paling parah dari praktik manajemen laba yaitu dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan seperti yang terjadi pada kasus Enron. Satu dampak yang sangat jelas pada saat kasus Enron yaitu para investor yang merugi karena nilai saham Enron yang ambruk sangat drastis. Hal tersebut disebabkan manajemen Enron yang telah melakukan *window dressing* dengan

memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar kinerjanya tampak baik. Bahkan, pendapatan di-*mark-up* sebesar US\$600 juta, dan utang senilai US\$1,2 miliar disembunyikan dengan teknik *off-balance sheet*. Auditor Enron, Arthur Andersen, disalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu. Manipulasi ini telah berlangsung bertahun-tahun, sehingga Sherron Watskin, salah satu eksekutif Enron yang tidak tahan lagi terlibat dalam manipulasi itu, mulai melaporkan praktik tidak terpuji tersebut. Kontroversi yang lain yaitu mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah rekan Andersen. Selain itu, kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen juga ikut terungkap. Karena masalah tersebut, Arthur Andersen harus berjuang keras menghadapi berbagai tuduhan, bahkan berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tidak kurang dari US\$32 miliar harus disediakan Arthur Andersen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan karena audit yang tidak benar (Said, 2002).

Salah satu kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp132 miliar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan

kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp32,6 miliar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp10,7 miliar (Badan Pengawas Pasar Modal – Bapepam, 2002).

Untuk meminimumkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang dapat berakibat terjadinya manajemen laba, perlu adanya suatu mekanisme pengawasan. Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko termasuk manajemen laba.

Komite Cadbury mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Sedangkan menurut *Center for European Policy Studies* (CEPS) GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk

mulai dari hak, proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan tanggal 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit. Menurut Egon Zehnder dalam FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Selain GCG, beberapa penelitian juga mengaitkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Dalam beberapa penelitian terdahulu GCG diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan komite audit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007), hasilnya mengungkapkan bahwa komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gulzar dan Wang (2011) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selain GCG, banyak juga penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Jao (2011) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) dan penelitian Guna dan Herawaty (2010) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. Sebelumnya telah banyak penelitian yang menganalisis pengaruh GCG terhadap manajemen laba dengan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu penulis akan menggunakan komposisi dewan

komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Teori agensi telah memunculkan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan pihak agen sehingga antara pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan berbeda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya dapat menimbulkan manajemen laba (Arifin, 2005). Untuk meminimumkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang dapat berakibat terjadinya manajemen laba, perlu adanya suatu mekanisme pengawasan. Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko termasuk manajemen laba. Untuk itu, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan tanggal 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris

independen dan komite audit. Menurut Egon Zehnder dalam FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Kasus manajemen laba telah menjadi fenomena di seluruh dunia yang berdampak buruk bagi perusahaan maupun lingkungannya. Seperti pada kasus Enron yang turut menyeret auditor independen yang mengaudit perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri kasus manajemen laba bukanlah hal baru, salah satunya kasus Kimia Farma yang terungkap pada tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?”

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). Akan tetapi, pandangan kedua memandang ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Watts and

Zimmerman (1990) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk meneliti pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) mengungkapkan bahwa komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gulzar dan Wang (2011) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao (2011) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) dan penelitian Guna dan Herawaty (2010) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba?

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap manajemen laba;
2. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba;
3. Menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen laba; dan
4. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dan perilaku manajemen, khususnya dibidang manajemen laba.

1.4 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian terdiri dari lima bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan dan menggambarkan fenomena yang terjadi terkait dengan permasalahan

tersebut. Dengan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih spesifik sebagai bahan acuan dalam menentukan hipotesis. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, dan di akhir bab dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang akan diterapkan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini. Merupakan landasan teori dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan. Sebagai acuan akan diuraikan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Dalam bab ini akan dijabarkan tentang kerangka pemikiran dalam penelitiandan hipotesis dari permasalahan yang diungkapkan dalam Bab I.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi variable penelitian dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dijelaskan tentang jumlah dan karakteristik sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang didapatkan, serta metode pengumpulan data. Selanjutnya akan dibahas metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari obyek penelitian yang berupa sampel.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan kekurangan dan keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian serta saransaran bagi penelitian lainnya

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemilik dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajer (agen). Hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Di dalam suatu perusahaan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*).

Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik

kepentingan antara *principal* dan *agent* (Gerianta, 2009). Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dibutuhkan kontrak yang jelas yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan meminimalisir konflik keagenan.

Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan prinsipal adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen sebaliknya, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001). Adanya asimetri informasi dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Ujiyantho, 2007). Salah satu cara untuk meminimalisir konflik keagenan dan asimetri informasi yaitu dengan menerapkan suatu mekanisme pengawasan melalui tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

2.1.1.2 Good Corporate Governance

Di era globalisasi pasar saat ini setiap perusahaan selain dituntut untuk semakin inovatif juga harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance) agar dapat terus bertahan. Komite Cadbury mendefinisikan *Good Corporate Governance*, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Sedangkan menurut *Center for European Policy Studies* (CEPS) GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) diperlukan asas GCG, sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adanya sistem *corporate governance* diperusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan *earning management*. Karena itu diduga dengan semakin tingginya kualitas audit, semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen, dan adanya komite audit maka akan semakin kecil pengelolaan laba yang oportunistik (Siregar, dkk, 2005).

Dalam penelitian ini unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* antara lain:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001).

Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996). Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996). Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack, 1996).

2. Komposisi Dewan Komisaris

Tindakan manajemen laba yang dapat berkembang menjadi manipulasi laba atau bahkan kecurangan laporan keuangan turut dipengaruhi oleh adanya pengawasan perusahaan yang tidak efektif. Fungsi pengawasan dari komisaris independen dibutuhkan sebagai control perusahaan terhadap aktivitas yang

dilakukan manajer perusahaan. Minimnya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan para manajer dapat leluasa melakukan manipulasi laba sesuai dengan yang mereka inginkan. Pentingnya independensi juga ditekankan oleh KNKG (2006) yang menyebutkan bahwa komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

3. Komite Audit

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ Nomor SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.1.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Iqbal, 2007). Tindakan manajemen laba ini

dimungkinkan dengan lebih banyaknya informasi yang dimiliki oleh manajer selaku agen yang menjalankan perusahaan dibandingkan prinsipal. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi itu disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi ini erat kaitannya dengan konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu ketika semua pihak memiliki dorongan untuk mendahulukan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga timbul adanya konflik antara prinsipal dengan agen. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang disesuaikan untuk kepentingan agen kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba (Widyaningdyah, 2001).

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Fischer dan Rosenzweig, 1995). Sedangkan Assih dan Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan *general accepted accounting principles*, untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000). Sedangkan menurut Sugiri (1998) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

a. Definisi Sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba.

b. Definisi Luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer didasari berbagai motivasi yang berbeda-beda. Scott (2009) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Scheme* (Rencana Bonus)

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.

2. *Debt Covenant* (Kontrak Utang Jangka Panjang)

Menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metoda akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.

3. *Political Motivations* (Motivasi Politik)

Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah.

4. *Taxation Motivations* (Motivasi Perpajakan)

Menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Biasanya CEO yang mendekati masa pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk.

Tujuannya adalah menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

6. *Initial Public Offering* (Penawaran Saham Perdana)

Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada publik, informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektus merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan manajemen laba, bergantung pada kondisi dan situasi perusahaan tersebut. Pola manajemen laba menurut Scott (2009) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

2. *Income Minimization*

Bentuk ini mirip dengan *taking a bath*, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat rasio profitabilitas perusahaan tinggi, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aset tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.

3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

Penggunaan pengukuran atas dasar akrual sangat penting untuk diperhatikan dalam mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dalam perusahaan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibebankan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut *normal accruals* atau *non discretionary accruals*;
2. Bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan *abnormal accruals* atau *discretionary accruals*.

2.1.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Ringkasan hasil penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ujiyantho dan Pramuka (2007)	<p>Independen: Kepemilikan manajerial, Proporsi dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, Ukuran dewan komisaris.</p> <p>Dependen: Manajemen laba, Kinerja keuangan</p>	<p>Kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>

2.	Nasution dan Setiawan (2007)	<p>Independen: Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan.</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
3.	Murhadi (2009)	<p>Independen: Keberadaan Komisaris Independen, Komite Audit, Dualitas CEO, <i>Top Share</i>, Koalisi Pemegang Saham.</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Keberadaan Komisaris Independen, Komite Audit dan Koalisi Pemegang Saham tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.</p> <p>Dualitas CEO dan <i>Top Share</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>
4.	Guna dan Herawaty (2010)	<p>Independen: Leverage, Profitabilitas, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi Auditor, Ukuran Perusahaan</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Leverage, Profitabilitas dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi Auditor dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>

5.	Gulzar dan Wang (2011)	<p>Independen: Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Dualitas CEO, Frekuensi Rapat Dewan, Rasio Jenis Kelamin Dewan Komisaris.</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Dualitas CEO, Frekuensi Rapat Dewan dan Rasio Jenis Kelamin Dewan Komisaris berpengaruh signifikan. Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh.</p>
6.	Jao dan Pagalung (2011)	<p>Independen: Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Leverage tidak berpengaruh</p>
7.	Daljono dan Nabila (2013)	<p>Independen: Komposisi Dewan Komisaris, Aktivitas Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Reputasi Auditor</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh negatif, sedangkan Aktivitas Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>

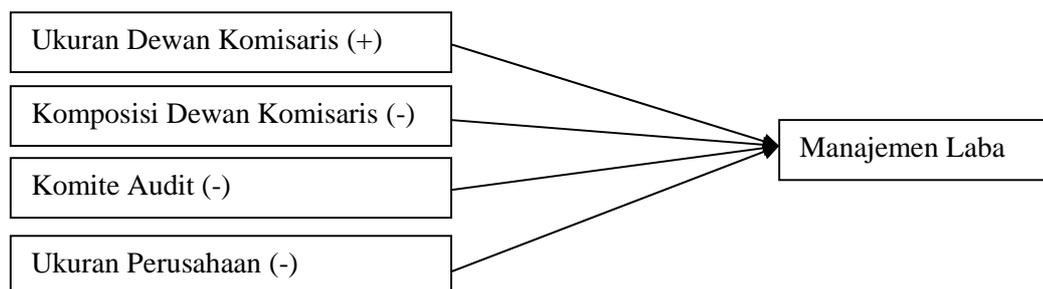
Sumber : Berbagai literatur pendukung penelitian

2.2 Kerangka Pemikiran

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap *earnings* yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* melalui komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Selain itu ukuran perusahaan juga diduga mampu mempengaruhi manajemen laba. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikembangkan oleh peneliti, 2015

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996).

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996). Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack 1996).

Terkait manajemen laba, ukuran dewan komisaris dapat memberi efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack, 1996). Untuk itu hubungan yang terjadi

antara ukuran dewan komisaris dan manajemen laba harusnya positif, makin banyak anggota dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) serta Gulzar dan Wang (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (KNKG, 2006). Berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (2006), komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Beasley (1996, dalam Nasution, 2007) menyarankan bahwa masuknya

dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Pernyataan ini bertolak belakang dengan penelitian Gulzar dan Wang (2011) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Murhadi (2009) juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari komisaris independen terhadap manajemen laba.

Dari uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Pedoman GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (2006), Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Perusahaan yang memiliki komite audit akan menghambat perilaku manajemen laba oleh pihak manajemen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menemukan sejak dini praktik-praktik yang bertentangan dengan asas keterbukaan informasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba (Murhadi, 2009). Dalam penelitian Nasution dan Setiawan (2007), dinyatakan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan ternyata juga mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Namun penelitian Daljono (2013) menyatakan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar

cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dan akurat dalam melakukan pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 variabel terikat (dependen) dan 4 variabel bebas (independen).

3.1.1 Variabel dependen

Manajemen laba dalam penelitian ini dilakukan melalui *total accrual* (TACC) dan *discretionary accrual* (DACC). Total akrual yang didefinisikan sebagai selisih antara *net income* dan arus kas dari aktivitas operasi, dibagi dengan *total asset*. *Total accrual* terdiri dari *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Modified Jones Model* merupakan model perhitungan yang sering digunakan dalam menghitung *discretionary accrual* karena model ini dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow *et al.* (1995). Untuk mengukur *discretionary accrual*, terlebih dahulu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan i di tahun t dengan metode sebagai berikut:

$$\mathbf{TAit = NIit - CFOit (3.1)}$$

TAit : total akrual perusahaan i pada periode t

NIit : laba bersih perusahaan i pada periode t

CFOit : aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

Total akrual ini dapat digunakan untuk mencari jumlah *discretionary accrual* yang menjadi proksi untuk manajemen laba. Nilai total akrual diestimasi dengan persamaan berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_i \quad (3.2)$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accrual* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rect/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) \quad (3.3)$$

Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = TAC_{it}/A_{it} - NDA_{it} \quad (3.4)$$

Dimana,

DA_{it} : *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} : *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TAC_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode ke t

Ni_{it} : Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke- t

A_{it-1} : Total aset perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} : Aset tetap perusahaan pada periode ke t

ΔRect : Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

α : koefisien tetap dari hasil regresi pada perhitungan *total accruals*

ε : *error*

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* yang dengan diproksikan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit, serta ukuran perusahaan. Masing-masing variabel tersebut diukur dengan:

1. Ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel;
2. Komposisi dewan komisaris, yaitu persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel;
3. Ukuran komite audit, yaitu jumlah susunan komite audit berdasarkan pada data yang dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan sampel;
4. Ukuran perusahaan dihitung dari nilai logaritma natural total aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012-2013. Perusahaan manufaktur dipilih karena dinilai perusahaan yang paling sensitif terhadap perubahan ekonomi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, yaitu penentuan sampel atas

dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2012-2013,
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel penelitian antara lain informasi mengenai komposisi dan ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.
3. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan periode tahun 2012-2013. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id, dan data dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan (Nurgiyantoro *et al.*, 2004). Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), distribusi frekuensi, nilai minimum dan maksimum serta deviasi standar.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesa harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat diketahui dengan beberapa cara salah satunya dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen (Ghozali, 2011). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahuinya digunakan grafik *scatterplot*, yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik (Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% dan titik-titik pada grafik *scatterplot* menyebar di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Jika terdapat pola tertentu yang

teratur, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2011). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat diketahui melalui uji *Durbin Watson statistic*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < dL$, maka tidak ada autokorelasi positif, hipotesis di tolak;
2. Jika $dL \leq d \leq dU$, maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan / tidak dapat disimpulkan;
3. Jika $4-dL < d < 4$, maka tidak ada autokorelasi negatif, hipotesis ditolak;
4. Jika $4-dU < d < 4-dL$, maka tidak ada autokorelasi negatif, tidak dapat disimpulkan; dan
5. Jika $dU < d < 4-dU$, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

3.5.3 Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel. Penelitian ini menggunakan *Software* SPSS Versi 21 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$DACC_{it} = \alpha_0 + \beta_1UDK_{it} + \beta_2KDK_{it} + \beta_3UKA_{it} + \beta_4SIZE_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

α_0	= Koefisien regresi konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$	= Koefisien regresi masing-masing proksi
$DACC_{it}$	= <i>Discretionary accruals</i> perusahaan i tahun t
KDK	= Komposisi Dewan Komisaris
UDK	= Ukuran Dewan Komisaris
UKA	= Ukuran Komite Audit
SIZE	= Ukuran Perusahaan
ϵ	= <i>error</i>

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai R^2 berkisar antara 0-1%, dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik. Selanjutnya menurut Ghozali (2011) kelemahan pada uji R^2 adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen, sehingga disarankan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Ghozali (2011). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut:

1. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen; dan
2. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan ($\text{Sig} \geq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Ghozali (2011) menyatakan, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bila t hitung $>$ dari t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat; dan
2. Bila t hitung $<$ dari t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.